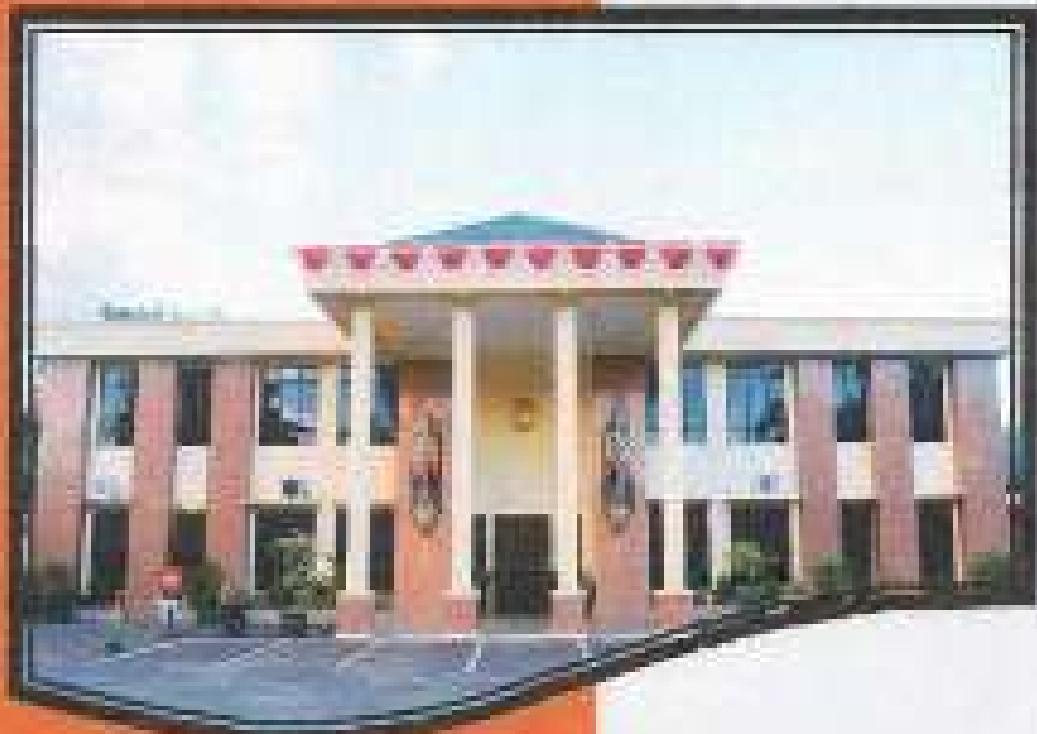


LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA



PENGADILAN NEGERI/TIPIDR/HILIRUNGKAN INDUSTRIAL
PALANGKA RAYA KELAS I A

Jalan P. Diponegoro Nomor 21 Kode Pos 73111
Palangka Raya - Kalimantan Tengah
Telepon / Fax (0538) 3221940
Website : www.pn-palangkaraya.go.id
Email : pnpalangkaraya1@gmail.com

KATA PENGANTAR



Syukur-pagi syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rizmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019. Laporan ini disusun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1730/RSK/OT.01.2/12/2019 t tanggal 16 Desember 2019 untuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 serin Surat dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : W16-U/826/07.01./XII/2019 t tanggal 12 Desember 2019 Perihal Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2019.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam penyelesaian laporan ini, namun demikian sejempurnanya laporan ini, kami juga mengharapkan masukan-masukan yang konstruktif, agar setiapnya lebih baik lagi.

Palangka Raya, 08 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI/PIMPIN
PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA KELAS IA,

PASKAU HARDIPATA, S.H., M.H.
NRP. 19630414 199312 1 0017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Daftar Isi	II
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN ACCREDITASI PEMERINTAHAN MUTU.....	8
A. Keadaan Perkara.....	8
B. Penyelesaian Perkara	9
1. Jumlah sisa perkara yang diperluk.....	9
2. Jumlah perkara yang diperlukan tepat waktu	10
3. Jumlah perkara yang tidak menggunakan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	11
4. Jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi.....	11
5. Jumlah perkara anak yang berhasil mediasi Diversi.....	12
C. Akreditasi Pemerintahan Mutu (Sertifikasi ISO Pengelolaan).....	13
1. Pas. Sekam (Perkara yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran)	13
2. Rijang Keliling/ Pelayanan Terpadu	15
3. Perkara Proses (Penyelesaian Daya Persepsi).....	16
BAB III PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN	17
A. Sumber Daya Manusia.....	17
1. Matasi.....	27
2. Wnumisi.....	29
3. Pensikan	29
4. Diklat	30
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA IT DAN TEKNOLOGI INFORMASI	32
A. Pengelolaan Keuangan.....	32

B.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	36
C.	Dukungan Teknologi Informasi	45
	1. Implementasi e-Service di lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya	45
	2. Implementasi SPP di lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya.....	48
BAB V	PERENCANAAN PEMERINTAHAN PUBLIK	
A.	Akkrediasi Perkantoran Madya.....	52
B.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	56
C.	Inovasi Pelayanan Publik.....	64
BAB VI	PENGAWASAN	
A.	Internal	73
B.	Evaluasi.....	77
BAB VII	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	79
B.	Rekomendasi	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan teknis, mempunyai tugas pokok seimbang, memutus dan mengadili perkara, serta dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintahan lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) **Fungsi Mengadili (judicial power),** yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjalankan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
- b) **Fungsi Pengawasan,** yakni mengendalikan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Para Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Juruwita/Jurusita Pengganti, serta seorang Pegawai pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.

- c) Fungsi Administratif, yakni merupakan fungsi administrasi umum, keuangan, dan kependidikan serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- d) Fungsi Lainnya :
 - a. Pelaksanaan pertama-tama hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya, (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung XI Nomor KMA/001/SK/II/1990)
 - b. Pelayanan pelaksanaan registrasi kuasa inskrimil yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah berhasil dengan sangat-sungguh dan saling mendukung satu sama lain yang dibuktikan dengan rasa tanggung jawab dan ketertiban oleh seluruh bagian yang berkait baik dari Aparatur Teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya. Sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Palangka Raya mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

VISI

*"Terwujudnya Peradilan Adil / Tepat /
Hilungan Industri Palangka Raya Kencis I & Yang
Agung"*

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut :

MISI

1. Mewujudkan Kemandirian Pengadilan Negeri / Tepat / Hilungan Industri Palangka Raya.
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan keberadaan Agama Kristen Kauhian.
3. Mengembangkan Kunitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri / Tepat / Hilungan Industri Negeri Palangka Raya.
4. Meningkatkan Civitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri / Tepat / Hilungan Industri Palangka Raya.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui perancangan, penentuan, perbaikan, pengkajian, pengelolaan berhadapan sistem lisibilitas dan penaturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Beranjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dari tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya disesuaikan dengan sasaran kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disusun dengan rukunya pemrograman nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 - 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Nilai serta tujuan organisasi pada tahun selanjutnya (2015 - 2019).

Adapun Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Pencari keadilan mempunyai korbudah dan kepuasannya terpenuhi
- 2) Setiap pencari keadilan dapat terjangkau bahan peradilan
- 3) Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya memenuhi butir 1 dan 2 diatas

Sedangkan Sosaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palangka Raya, adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- 2) Peningkatan Kekalitasan Pengadilan Penyelesaian Perkara;
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Kiskin dan Terpinggiran.
- 4) Meningkatnya Keputuhan terhadap Putusan Penadilan.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Palangka Raya memanfaatkan beberapa program. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:

i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Gantinya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Gantinya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai peningkatan yang berkelanjutan. Pada tahun 2019 kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yang terdiri dari:

a. Layanan Dukungan Manajemen Sarker;

- Pengelolaan Keuangan dan Perbaudahanan

b. Layanan Perkantoran;

- Gaji dan Tunjangan

- Operasional dan Pemeliharaan Kantor

2) Peningkatan Sistem dan Prasaranan Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sistem dan Prasaranan Aparatur Mahkamah Agung berujung untuk mencapai sistem strategis dalam penyelatan sasisa dan prasaranan. Pada tahun 2019 kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam pelaksanaan Program ini yaitu Pengadaan Sasisa dan Prasaranan di Lingkungan Mahkamah Agung yang terdiri dari Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi;

- Laptop untuk Hakim
- Pengadaan laptop Hakim PN.PUR

3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk membangun sistem strategis dalam hal penyelesaian perkara, tata kelola administrasi perkara, dan akreditasi masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum:
 - Layanan Pos Bantuan Hukum
2. Perbaikan Peradilan Umum yang disesalkan ditengah pertama dan banding yang tepat waktu.

- Periksa Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Kalimantan Tengah;
- Periksa Pidana Korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Kalimantan Tengah;
- Periksa PHI yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Kalimantan Tengah;

BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

A. KEADAAN PERKARA

Matrik keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Perkara	Tgl Perkara Tahun Lalu	Perkara Masa	Perkara Dilanjut	Sisa Perkara
Pidana	70	513	517	66
Hitam	-	-	-	-
Pidana Ringan	-	3	2	-
Pidana Umum	-	58	58	-
Gajah	-	13	11	-
Pidana Anak	-	-	-	-
Pidana Pid.	1	5	6	-
Percobaan	-	-	-	-
Perkara Lain	-	5791	5791	-
Lainnya	32	218	217	53
Percobaan	-	-	-	-
Custos	-	-	-	-
Percobaan	1	100	99	2
Fordatu	-	-	-	-
Fremoloman	-	-	-	-
Pardatu	0	16	21	6
Liajutan	-	-	-	-
Riderman	-	-	-	-
EPTI	3	16	16	3
Pidana Umum	23	4	4	2
Percobaan	-	-	-	-
PERIODIK	10	33	34	9

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara yang diputus pada tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Evidence	Jumlah sisa perkara diambil alih	Jumlah sisa perkara yang diperlakukan
Pidana	70	62
Ekonomi	-	-
Pidana	-	-
Tipikor	-	-
Pidana	-	-
Cepat	-	-
Pidana Anab.	-	-
Pidana Pra Kerjanya	1	0
Peradilan	-	-
Perkara Lain	-	-
Umum	-	-
Pecelitian	32	53
Eksploitasi	-	-
Pembunuhan	1	2
Penganiayaan	-	-
Pengancaman	0	1
Keberadaan	-	-
Organisasi	-	-
Pengembangan	-	-
PTBB	3	3
Pendekatan/ Bantuan	-	-
TIPIKOR	10	9

3. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Perkara	Jumlah perkara putus	Perkara yang diputus tepat waktu
Pidana	517	517
Aduan	3	3
Pidana dan Bangunan	58	58
Pidana Cipta	11	11
Pidana dan Perkawinan	6	6
Percobaan Diri	5791	5791
Curian	217	217
Pencurian	99	99
Pembunuhan	21	21
Pengaturan perdagangan	16	16
PZP	1	1
Perbaikan dan Pemeliharaan	34	34

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

Kasasi dan PK

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Perkara	Surat Perintah Ketua Pengadilan yang belum berjalan	Surat Perintah Ketua Pengadilan yang belum berjalan menurut Pak Pengadilan	Total
Pidana	537	535	
Uang			
Pidana & Uang			
Perdata Dituntut PAW	244	242	285
Perdata Dituntut PK		13	
Perdata Dituntut PK dan PAW	52	36	41

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2019 adalah sebanyak 4 perkara dengan tindak sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Pihak Perkara	Majelis Hakim
1	SiP.04/Pdt.G/2019 /PN.Ptk (berhal) dengan akta periklanan	defender Lawyer Anasascha Kartadiwita	Zulfiani, S.H., M.H. Eini Widayati, S.H., M.H. Evylene Septupati, S.H., M.H.
2	No.123/Pdt.Q/ 2019/PN.Ptk (berhal) dengan akta periklanan	lawyer 1. Sabiturni 2. Maria Louise 3. Dianing Rosaria 4. H. Jumanty Ichlyus 5. Mimic Kuryanic 6. Toto Purnadi 7. Setiawan	Zulkifli, S.H., M.H. Jimmy Ray Jr., S.H., M.H. Evylene Septupati, S.H., M.H.
3	No.129/Pdt.G/2019 (PN.Ptk) (berhal) dengan akta periklanan	Eudina Hartono Lawyer Pimpinan dan Menteriku Hukum Mahkamah	Evylene Septupati, S.H., M.H. Jimmy Ray Jr., S.H., M.H., Evethylene S.H., M.H.
4	No.156/Pdt.G/2019 (PN.Ptk) (berhal) dengan akta periklanan	Lia Mri.Sien Lawyer Iwan Tjajijati	Eini Widyati, S.H., M.H. Erhardi Hukum, S.H. Maria Rina Subbagewati, S.H., M.H.

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui dikeset.

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui dikeset oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2019 adalah :

No.	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Majelis Hakim
1			

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. Pendekatan (zat/zara yang mendapat akreditasi dan Realisasi Anggaran)

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa: Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat menutupi hak dasar sejara baya dan modal yang menghindari insidah hukum. Sebagaimana dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pem. Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku (Fasal 27).

Pantuan Hukum tersebut meliputi mendampingi, kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melaksanakan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk:

- i. Kegiatan dan mendampingi baik bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mempersiapkan akseptabilitas

2. Mewujudkan hak konstitusional bagi warga Negara dengan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara mutlak di seluruh wilayah Negara Indonesia;
4. Mewujudkan peneguhan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pand 25-BEMA No. 10 Tahun 2010, bahwa juga bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian inkrimasi, konsultasi, dan advokasi serta pencatatan Advokat pendamping secara Cum-a-Cum-a untuk membela kepentingan Terangka/Tersikwa dalam hal Terdakwa tidak cukup mempunyai sumber perasihan miliknya.

Adapun jumlah alihmaqdisasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Jumlah Alihmaqdisasi pada tahun 2019	Rendahnya Anggaran tahun 2019	% Realisasi Anggaran
Rp. 49.000.000	Rp. 49.000.000	100%

2. Sidang Kelling/ Pelajaran Terpadu

Sidang kelling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan untuk datang ke lokasi pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan lainnya. Pelajaran Terpadu sidang kelling meliputi:

- a. Perkembangan perkara pengesahan perkawinan dan perdata terimut lainnya oleh Pengadilan Negeri atau itsiat nikah oleh Pengadilan Agama/Majlis Masjid Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencegahan perkawinan dan pencatatan kelahiran;
- b. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
- c. Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2019 tidak ada perkara yang menggunakan sidang kelling/ Pelajaran terpadu pada Pengadilan Negeri Pahangka Raya.

3. Perkara Prodeo (Pembelaan Biaya Perkara)

Bantuan hukum untuk memenuhi pelayanan kepada publik sejalan dengan memberi hak atas biaya perkara cuma-cuma (prodeo) yang ditetapkan oleh SIKMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, diyahabdoan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu finansial seseorang ekonomis.

Pada tahun 2019 tidak ada alokasi anggaran untuk perkara yang ditetapkan melalui perimbangan biaya perkara pada Pengadilan Negeri Palangka Raya. Berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 dimana terdapat anggaran sebesar Rp. 2.667.000,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluhan Tujuh Ribu Rupiah). Namun anggaran tersebut juga tidak terserap. Adapun yang menjadi penyebab tidak terserapnya anggaran untuk perkara yang diselesaikan melalui pembelaan biaya perlira adalah disentakan tidak adanya masyarakat yang mengajukan perkawinan secara prodeo.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia dapat di definisikan sebagai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya tisu yang dimiliki individu. Dalam hal ini dengan SDM yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya yang merupakan salah satu instansi Pelaksanaan Publik maka kualitas dari Pelaksanaan akan sangat penting dibutuhkan dukungan SDM berkualitas yang menentukan keberhasilan dalam setiap pelaksanaan publik. Sumber Daya Manusia dalam hal kuantitas yang mendukung pelaksanaan Kinerja dan Pelaksanaan Publik pada Pengadilan Negeri Palangka Raya terdiri atas SDM Teknis Yudisial dan SDM Non Teknis Yudisial dengan jumlah sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial terdiri dari :

NO.	JABATAN	JENIS KEGIATAN		JUMLAH	PERIODIKITAS
		L	P		
1.	Rahim Larier Imanwala Ketua/Wakil	6	4	10	SI=1/S2=0
2.	Habibullah Tipton	1	-	1	SI
3.	Habib Affan PTII	4	3	8	SI=1/S2=0
4.	Panditno	1	-	1	SI
5.	Panditno Muji	1	4	5	SI
6.	Panditno Prayoga	7	6	13	SI=13
7.	Juranta	1	2	3	KM=1/S1=2
8.	Juranta Prayoga	-	1	1	SI=1
10.	Periganten/Asisten Perikam	1	-	1	SMA=1
11.	Pearata Peradihan	-	-	-	-
JUMLAH		36	18	54	

Sumber Daya Manusia Non Teknis, Jumlah dan

No.	JABATAN	JENIS		JUMLAH	PERIODIKASI
		L	P		
1.	Belajarlah	-	1	1	51
2.	Rencanalah	-	2	2	83
3.	Pengelolaan Umum	1	3	6	93/6=1,7/3=2,91=1/82=0
4.	Program pelajaran	-	-	-	-
5.	Fungsiwal Pendidikan	-	-	-	-
6.	Praaktis Eksperim.	-	-	-	-
7.	Programasi Bantahan	-	-	-	-
JUMLAH		1	9	10	

Perbandingan Penemp. Teknis dan Non Teknis

No.	JABATAN	TEKNIK		JUMLAH
		TERSEDIA	HOD TEKNIK	
1.	Pengadilan Negeri Palangka Raya	13	0	13

Secara lengkap Profil Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Palangka Raya beserta jabatannya hingga 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

NO.	PROFIL	DODOMA
1.	 	Nama : Pakuan Hartawan, SH., MM. NIP. 19590414 199902 1 001 Jabatan : Kepala
2.		Nama : Mardiansyah, SH., MM. NIP. 19650601 199903 1 003 Wakil Ketua

1		Nizam S.I.P. Jabatan	Aldio, SH., MH. 19830301 199211 1 001 Hakim
2		Zuhdi, S.H., MH. 19850809 199503 1 002 Hakim	
3		Widiyanto S.I.P. Jabatan	Dr. Widiyanto, SH., MH. 19800517 199902 2 001 Hakim
4		Dikermal Hakim, SH., MH. 19800209 199102 1 001 Hakim	
5		Djianur Simanjuntak, SH., MH. 19770724 199306 2 001 Hakim	
6		Eddyne Pugimpa, SH., MH. 19770814 200211 2 002 Hakim	
7		Jimmy Radis, S.E. 19770601 200211 1 004 Hakim	
8		Maria Ratu Sulistiwati, SH., MH. 19770405 200212 2 004 Hakim	

11.		Nerry N.P. Jatmiko	Azizur Rahim Syaputra, S.E., M.H. -- Heldian Aditno Triptikor
12.		Heru N.P. Jatmiko	Riyadi, S.H., M.H. -- Heldian Aditno Triptikor
13.		Heru N.P. Jatmiko	Dedi Wijayantoro, S.H., M.H. -- Heldian Aditno Triptikor
14.		Heru N.P. Jatmiko	Adieman Purba, S.E., M.H. -- Heldian Aditno Triptikor
15.		Heru N.P. Jatmiko	Arvan Loekman Pranawa, S.I.L., M.M. -- Heldian Aditno Triptikor
16.		Heru N.P. Jatmiko	Lidi Yulianty, S.H., M.I.C. -- Heldian Aditno Triptikor
17.		Heru N.P. Jatmiko	Muhammad Sulmi Burhan, S.H., M.I.L. -- Heldian Aditno Triptikor
18.		Heru N.P. Jatmiko	Drs. Nur Iman -- Heldian Aditno Triptikor
19.		Heru N.P. Jatmiko	Hariyadi Ananta, S.I.T., M.P.I. (0650601.00001.7.1961) Panjatan

20.		Nuraini, NIP Johanna	Hj. Sri Widuri, S.Sos, SH 19670305 199003 2 001 Sekretaris
21.		Nuraini, NIP Johanna	Kongres, WH 19670305 199003 2 001 Penulis Buku Dakopri
22.		Nuraini, NIP Johanna	Bersikap Sosial, SH 19670305 199003 2 001 Penulis Buku Perkira
23.		Nuraini, NIP Johanna	Sentosa Simanjorang, SH 19710220 199203 2 001 Penulis Buku Perkira
24.		Nuraini, NIP Johanna	Rosie, SH 19670305 199003 2 001 Penulis Buku Klasifikasi PHC
25.		Nuraini, NIP Johanna	Rifandi, Adiwiyah 19710518 199403 2 001 Penulis Buku Klasifikasi PHC
26.		Nuraini, NIP Johanna	Rusdiana, SH 19670305 199003 2 001 Konsil Hsg. Kepengurusan Organisasi dan Tropokwani
27.		Nuraini, NIP Johanna	Maryam, SC 19850721 200003 2 001 Konsil Hsg. Kepengurusan Organisasi dan Tropokwani
28.		Nuraini, NIP Johanna	Indah Yuli Prayati, SH 19680701 199303 2 002 Pendamping

LAPORAN TAHUNAN 2019

29.		Nama: N.I.P. Jabenam	Bogor, 19330111 195603 1 002 Paritara, Pengganti
30.		Nama: N.I.P. Jabenam	Jogja, 19620905 195301 1 007 Paritara, Pengganti
31.		Nama: N.I.P. Jabenam	Blitar, 19600908 196003 2 002 Paritara, Pengganti
32.		Nama: N.I.P. Jabenam	Lhok, 58 19640620 196901 2 002 Paritara, Pengganti
33.		Nama: N.I.P. Jabenam	I.Ganteng Sugeng Sandhi, 52 19640607 200806 1 001 Paritara, Pengganti
34.		Nama: N.I.P. Jabenam	Tegal, Buleleng, 58 19520807 200805 1 001 Paritara, Pengganti
35.		Nama: N.I.P. Jabenam	Buleleng, Kintam, 58 19670425 200004 1 002 Paritara, Pengganti
36.		Nama: N.I.P. Jabenam	Elmira, 58 19730123 200601 1 001 Paritara, Pengganti
37.		Nama: N.I.P. Jabenam	Buleleng, Kintam, 58 19580124 200504 1 011 Paritara, Pengganti

38.		Nama : N.I.P : Jabatan :	Sari Ramadhanti, S.H. 19850618 200902 2 011 Panditra Pengganti
39.		Nama : N.I.P : Jabatan :	Taty, S.H. 19820216 200904 2 011 Panditra Pengganti
40.		Nama : N.I.P : Jabatan :	Nuraini, S.H. 19671013 200604 2 017 Panditra Pengganti
41.		Nama : N.I.P : Jabatan :	Hes Mahyza Melala, S.H. 19871010 201101 2 014 Panditra Pengganti
42.		Nama : N.I.P : Jabatan :	Mariana, S.H. 19750602 200617 2 002 Panditra Pengganti
43.		Nama : N.I.P : Jabatan :	Haryati, S.H. 19750307 200404 2 002 Inovator
44.		Nama : N.I.P : Jabatan :	Wajidin 19650625 199003 1 005 Juruchia
45.		Nama : N.I.P : Jabatan :	Hafizwardi, S.H. 19890710 200912 2 001 Inovator
46.		Nama : N.I.P : Jabatan :	Ibu Murniawati, S.H. 20020410 200604 2 004 Juruchia Pengganti

LAPORAN TAHUNAN 2019

47.		Nissa Nurul Jihane	Salindri 19710705 201008 2 002 Perigrahiniyah Perkasa
48.		Nissa Nurul Jihane	Nissa Indri, S.E., M.SI 19821002 100904 2 002 Perigrahiniyah Umar
49.		Nissa Nurul Jihane	Nissa Zaryati, SE 19871126 100904 3 013 Perigrahiniyah Umar
50.		Nissa Nurul Jihane	Siti Noz Ajali, SH., MM. 19780104 200604 2 002 Perigrahiniyah Umar
51.		Nissa Nurul Jihane	Aisyah Kebur Nasution 19721110 195009 2 002 Perigrahiniyah Umar
52.		Nissa Nurul Jihane	Latifah Kalimantan, A.Yud 19801224 200012 2 002 Perigrahiniyah Umar
53.		Nissa Nurul Jihane	Firdaus Hasyim, A. MM 19661017 200912 2 001 Perigrahiniyah Umar

Profil Tenaga Honorer

NAMA	TITAH	JENIS
Aldina J. Saragih	Prajurit di perbatasan di Kepulauan Riau.	
Eka Nirmawati	Prajurit di perbatasan di Kepulauan Riau.	
Suryo	Prajurit di perbatasan di Kepulauan Riau.	
Ratuji Srikenc	Sipiru di perbatasan di Kepulauan Riau.	
Fikriana Purniawati	Sipiru di perbatasan di Raja Ampat.	
Hoki Kartowulan	Prajurit di perbatasan di Kepulauan Riau.	
Prency	Prajurit di perbatasan di Pengadilan Tinggi / PTI	

10	Jenny Jatmika	Sampai dipertanggungjawabkan di Kepemimpinan Hukum
11	Timothy Aun. Angga Nurman	Sampai dipertanggungjawabkan di Kepemimpinan Tegidah
12	Dewi Hartika	Sampai dipertanggungjawabkan di Sub Bogor (Lembar dan Konsolidasi)
13	Kusyai	Sampai dipertanggungjawabkan di Penugasan Tipikor / PII
14	Ferry S. Siregar	Sampai dipertanggungjawabkan di Kepemimpinan Pidana
15	Gusti Deniwina	Sampai dipertanggungjawabkan di Sub "Tegalan 0771" & Portofolio X-Court
16	Tobiasa Irwandy Siswadi	Sampai dipertanggungjawabkan di Dik. Dik. Kepag., Organisasi dan Teknologi Lokasi.

10	Dianca Kurniawati 	Pengembang sumber daya di Pengadilan Negeri Palangka Raya
11	Rusgiantoro Walidyo 	Sekretaris

Data Mutasasi Keluar Tahun 2019

No	NAMA	JURISDIKSI	JALAN	TGL
1	Kurnia Yanti Hamzah, S.H., M.H.	Kemis PN. Palangka Raya	Halimun Tinggi PT. Properti	29-10-2019
2	Ageny Wondama, S.H.	Halimun PN. Palangka Raya	Wakil Ketua PN. Taluk	20-08-2019
3	Des. Anwar Jaya, S.H., M.H.	Pantura PN. Palangka Raya	Pantura PN. Lubuk Pakam	04-09-2019
4	Rusgiantoro, S.H.	Pemerintah PN. Palangka Raya	Pemerintah PN. Samarinda	04-09-2019
5	Barts, S.Si., SH	Pemerintah PN. Palangka Raya	Pemerintah PN. Samarinda	04-09-2019

Data Mutasi Mawali Tahun 2019

No	NAMA	DITUGAS Oleh	PENGARUH TERHADAP	KETERWAKINAN
I	Pandita Hadiwulan, S.H., MH	Wakil Ketua PN. Pekan	Rombongan Pengacara PN. Palangka Raya	Sudah Melaksanakan Tugas
II	Imanul Hikam, SH., MH.	Wakil Ketua PN. Tambang Ungu	Rombongan Pengacara PN. Palangka Raya	Sudah Melaksanakan Tugas
III	Hari Djatmaji, SH., MH.	Panitera PN. Cimanggar	Panitera PN. Palangka Raya	Sudah Melaksanakan Tugas
IV	Bambang Sulisti, SH., MH.	Panitera Pilkada PN. Bantul	Panitera Pilkada PN. Palangka Raya	Sudah Melaksanakan Tugas
V	Lurah, S.I.	Panitera PN. Ketapang	Panitera Pengadilan PN. Palangka Raya	Sudah Melaksanakan Tugas
VI	Sari Ratnawulan, S.H.	Panitera Pengadilan PN. Ketapang	Panitera Pengadilan PN. Palangka Raya	Sudah Melaksanakan Tugas
VII	Ibu Melinda Melinda, SHK	Panitera Pengadilan PN. Horor	Panitera Pengadilan PN. Palangka Raya	Sudah Melaksanakan Tugas

Data Promosi Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	HARGA PANGKAT
1	Suci Lestari, S.P., S.Si.	Pengadministrasi PN. Palangka Raya	Kasubbag Umum & Keuangan PN. Palangka Raya	Bukan internal TPM tetapi SK Belum ditetap
2	Latih Retnawati, A.Md.	Pengadministrasi PN. Palangka Raya	Kasubbag Kepegawaian & Organisasi PN. Palangka Raya	Bukan internal TPM tetapi SK Belum ditetap
3	Sukanditik	Pengadministrasi PN. Palangka Raya	Jurusan Penggawai PN. Palangka Raya	Bahan terambil
4	Hj. Sri Wijanti, S.Sos., S.Pt.	Sekretaris PN. Palangka Raya	Sebelumnya PT. Palangka Raya	Bahan terambil
5	Yonniati Simatupurnak, S.H.	Pencah. Pedana PN. Palangka Raya	Pencah. Penggawai PT. Palangka Raya	Bahan terambil
6	Wendy Iriandyah, S.Pd.	Pencah. Liputan PN. Palangka Raya	Pencah. Penggawai PT. Palangka Raya	Bahan terambil
7	Hj. Muzakkirah, S.H.	Panitara Penggawai PN. Palangka Raya	Panitara Penggawai PT. Palangka Raya	Bahan terambil
8	Bobby Erwanto, S.I.I	Panitara Penggawai PN. Palangka Raya	Panitara Pizzata PN. Palangka Raya	Bahan terambil
9	Teguh Budiono, S.H.	Panitara Penggawai PN. Palangka Raya	Panitara Tipikor PN. Palangka Raya	Bahan terambil
10	Latih Dayati, A. Md.	Pengadministrasi PN. Palangka Raya	Jurusan Penggawai PN. Palangka Raya	Bahan terambil

Data Penilaian Tahun 2019

NO	NAMA PEGAWAI TAHU	PERIODE	TAHU	KETERJALAN
1			MIII	

Diklat S2M Teknis/Bsn. Teknis yang telah mengikuti Diklat

No	NAMA	KEGIATAN	DIKLAT YANG DIKURSI
I	- Bima Vallazy, SH., MM - Muhammad Sulis Syahmi, SH., MM	Hilma Adhoc PSH	Pendidikan dan Pelatihan Berilah Habis, PSH
II	Zulkardi, SH., MM.	Hilma	Metode Uji Keputusasaan dan Kelayakan Galeri Pengajuan PN Kecamatan BP/KA 2019
III	Dian Ramliwati, SH., MM	Hilma	Pelatihan Teknis Tinjauan Perencanaan dan Peningkatan Perjalanan
IV	Dian Ramliwati, SH., MM	Hilma	Diklat Terpadu Kebutuhan Hidrat dan Lahan Angkutan II
V	Jimmy Key Jr., SH.	Hilma	Diklat Terpadu Kinerja dan Ratakan Angkutan ke III
VI	Hj. Sri Wilanti, S.Sos., SH.	Gubernur	Sekolah Calon Pejabat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2019
VII	- Allen, SH., MM. - Dedi Roswandhi, SH., MM. - Armin Susilo Mulyadi, SH., MM	Hilma Hilma Allen Dipkor	Pelatihan Gerakan Perangkatda Kecamatan Apabila Petugas Balai PdPH Tahun 2019
VIII	Maryam, SH, Maryam, SH,	Kasubbag. PTIP Ditresda	Bantak Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kompetensi Negara/Lembaga Tingkat Wilayah (LANTW) TA. 2019
IX	Hj. Sri Wilanti, S.Sos., SH. Suciham, SH., MM.	Gubernur PT. Kasubbag. Urusan & Kesiangan	Pelatihan Verifikasi, Validasi dan Reviu Dokumen Kekonsistenan IUP HK El etas Pelaksanaan Penetapan Konsesi ESDM Tahun 2017-2018

20	Modamai, SH Bh. Nee Asih, SH., MH	Rumah tangga PTP Pengelolaan rumah tangga	Wawancara Penelitian Pengembangan Sistem Kewarganegaraan Komunitas TA 2019
21	Budi Juhardi, SH., MH	Pendidikan	Blended Learning Indonesia Pengembangan Program STKIP PGRI Cirebon Wilayah Indonesia Pengaruh Tinggi Banjarmasin selama TA 2019
22	Zulkihi, SH., MH Agus Widiono, SH.	Riset	Training Of Mentor Pengabdian PPG Berpadu Dengan Pendekatan Lintas
23	Kurnia Yanti Siarmanto, SH. M.Pd.I Zulkihi, SH., MH Agus Widiono, SH Jenny May Jr., SH	Riset	Training Of Trainer Didikin 3 Program PPG Berpadu Angkatan III Dengan Pendekatan Lintas

BAB IV**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI****A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

Program-program yang direalisasikan melalui kegiatan terkait dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2019, terdiri dari DIPA Dijen Badan Peradilan Umum yang telah di revisi sebesar 5 kali dan DIPA Bidan Unsur Administrasi yang telah di revisi sebesar 9 kali sebagaimana berikut :

No.	Uraian	Pengeluaran	Rincian Biaya	Persentase (%)
1.	Program Pengembangan Manajemen Penitikan Unesco (DIPA Dijen Badan Peradilan Umum)	125.115.000,-	100.562.500,-	80.57%
2.	Program Dikempar Manajemen Dan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Miskin dan Autis (DIPA BIDAN)	10.371.234.028,-	10.286.000.028,-	98.30%
3.	Program Pengelolaan Bantuan dan Pembiayaan Apaunor Mahasiswa yang DPOWERSA	78.000.000,-	77.747.000,-	99.69%
	JUMLAH	11.774.655.000,-	10.628.627.028,-	98.09%

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Dengan anggaran Rp. 10.371.351.000,- (Sepuluh Miliar Tiga
Ratus Tujuh Puluhan Batu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu
Rupiah) terrealisasi sebesar Rp. 11.261.356.420,- (Bisepuluh Miliar
Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu
Empat Ratus Dua Puluhan Rupiah) atau mencapai realisasi 99,58%.
Program ini dimaksudkan berlajuan menuju kesempurnaan
dalam pengelolaan dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas
teknis persidikan dengan memaksimalkan kinerja sistem
perkantoran. Program ini hampir mencapai kesemuannya yaitu
terpenuhinya penyelidikan, saranma prasaranra, organisasi dan
administrasi, sehingga dapat menuju pelaksanaan tugas.

2. Program Peningkatan Bantuan dan Prasaranra Apurutur Mahkamah Agung

Dengan anggaran Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluhan Delapan Juta
Rupiah) Terrealisasi sebesar Rp. 77.747.000,- (Tujuh Puluhan Tujuh Juta
Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau mencapai
99,08%. Program ini dapat dikategorikan sudah mencapai sasaran
sesuai target, yang berujung meningkatkan penyelidikan fosilos
sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan.

Perbandingan realisasi DIPA yang terserap selama 2 (dua) tahun berjalan yaitu :

TAHUN	BUDGET RP.000	REALISASI RP.000	%
2018	11.308.307.000	11.214.906.046	98,90
2019	10.449.331.000	10.338.305.420	98,54

Dari uraian tabel di atas, terlihat bahwa perbandingan terserapnya DIPA dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang mana realisasi tahun 2018 sebesar 98,90% dan tahun 2019 sebesar 98,54%.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

DIPA Badan Peradilan Umum memiliki Pagu anggaran sebesar Rp. 325.335.000,- (Tiga Ratus-Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Pagu anggaran tersebut telah mengalami revisi sebanyak 3 kali agar anggaran dapat terserap sesuai dengan kebutuhan sekitar dan terrealisasi sebesar Rp.320.562.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau mencapai 98,53%.

Perbandingan realisasi DIPA yang terserap sebanyak 2 (dua) tahun berjalan yaitu :

TAHUN	BANDAIRPT	REALISASI P%	%
2018	192.133.000	331.434.000	97,24
2019	125.315.000	320.562.500	96,53

Dari uraian tabel di atas, terlihat bahwa perbandingan terserapnya DIPA dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang mana realisasi tahun 2018 sebesar 97,24% dan tahun 2019 sebesar 96,53%.

E. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Tidak ada Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung pada tahun anggaran 2019.

b. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Untuk tahun anggaran 2019 ini Prioritas Anggaran Pemeliharaan Gedung mendapatkan anggaran Pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 970.781.000 , Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya dan Rantau Cinao Kacca sebesar Rp. 14.490.000 .

Riwayat Pemeliharaan Sasis dan Pemasaran Gedung

Kategori	Jumlah	Harga	Keterangan	Total	
				Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan	Traveling sasis	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-		
Catting lantai	gedung				
B.	pemasaran sasis				
Hilang	basa, rpl, kakil				
Kurir,	akar rayuan				
Hilang		Rp. 14.950.000,-	Rp. 14.950.000,-		
Revolusi					

a. Penghapusan

Proses penghapusan parkir sasis / pemasaran gedung tahun anggaran 2019 tidak ada.

2. Ramaan dan Pemasaran Pusatkan Gedung

a. Pengadaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusatkan Gedung pada tahun anggaran 2019 terdiri atas :

- ✓ Pengadaan Penitance dan Meja dengan anggaran sebesar Rp. 78.000.000,-

Bakalputihab Pengadilan Peradilan Ganthung

No.	Kategori	Dampak/Visi CPD/Panitia	Mengelola	Respon	Tujuan
1.	Diketahui	Terwujudnya sistem dan proses di panitia kegiatan HII	perbaikan teknik mengelola panitia kegiatan	Sp. TH.000.000- Rp. 77.747.000,-	
-	Pengadaan				
-	Pembentukan				
-	Rencana				

b. Penelitian

Untuk penelitian sains dan proses Peradilan Ganthung tahun anggaran 2019 terdiri dari penelitian :

- ✓ Riset dan Dikti
- ✓ AC.Binaan
- ✓ Penelitian Pengolah data berupa komputer dan laptop
- ✓ Print
- ✓ Riset
- ✓ Mesin Cetak

Rakamdata Pemeliharaan Fasilitas Gedung

No.	Kode Item	Nama Item	Periode		Jml.
			Awal	Akhir	
1.	Peralatan	Perangkat	Rp. 1.052.697.631	Rp. 1.052.697.631	
2.	Alat Tulis dan ATK				
3.	Media:	Kتاب渊本:			
4.	- Kertas:	紙張渊本:			
5.	- Buku:	書籍渊本:			
6.	- Kertas cetak:	印表紙渊本:			
7.	- Komputer:	电脑渊本:			
8.	- Laptop:	筆記本渊本:			
9.	- Printer:	印表機渊本:			
10.	- Monitor:	螢幕渊本:			
11.	- Monitor Komput:	顯示器渊本:			

c. Penghapusan

Proses penghapusan pada surat / proses surat fiktif gedung tahun anggaran 2019 tidak ada.

Matrik sumber / pascastrata pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

No.	Kelompok/Pascastrata/Sumber	Jumlah	Ketimpangan
Sumber/Pascastrata/Golongan			
1.	Ruang Ketsua	1	
2.	Ruang Wajah Netral	3	
3.	Ruang Pandemik	1	
4.	Ruang Belantara	1	
5.	Ruang Sidang Umum	3	
6.	Ruang Kepersidikan	5	
7.	Ruang Pendana Peruganti	1	
8.	Ruang Komisi Pers	1	
9.	Ruang Tunggu Terdakwa	1	
Hukum			
10.	Ruang Mediasi	1	
11.	Ruang Penahanan	1	
12.	Ruang Sekretariatum	3	
13.	Ruang Server/IT	1	
14.	Ruang Perpusakaan	1	
15.	Ruang Kesehatan	1	
16.	Mushola	1	
17.	Ruang Sidang/Tinjau / PBI	2	
18.	Ruang pertemuan	1	
Sumber/Pascastrata - Realitas			
Pekalongan			
19.	Bersar	8 Unit	Uraian Komisi Daerah

LAPORAN TAHUNAN 2019

18.	Router	1 Unit	Dalam Kondisi Baik
19.	Switch Hub	1 Unit	Dalam Kondisi Baik
20.	Network Interface External	6 Unit	Dalam Kondisi Baik
21.	Bagi-Split	1 Bush	Dalam Kondisi Baik
22.	PC unit	31 Unit	Dalam Kondisi Baik
23.	Laptop	19 Unit	Dalam Kondisi Baik
24.	Periferi Jaringan Laptop	5 Bush	Dalam Kondisi Baik
25.	Comics Digital	1 Unit	Dalam Kondisi Baik
26.	Monitor	3 Bush	Dalam Kondisi Baik
27.	Printer	18 Unit	Dalam Kondisi Baik
28.	CCTV	16 Unit	Dalam Kondisi Baik
29.	Media Access	3 Unit	Dalam Kondisi Baik
30.	Sound System	1 Bush	Dalam Kondisi Baik
31.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12 Bush	Dalam Kondisi Baik
32.	Resident Telephone	1 Bush	Dalam Kondisi Baik
33.	Faximile	1 Bush	Dalam Kondisi Baik
34.	Internet	1 Bush	Dalam Kondisi Baik
35.	Hardisk	2 Bush	Dalam Kondisi Baik
36.	Speaker Komputer	6 Bush	Dalam Kondisi Baik
37.	Tape Recorder	~14 unit	-
38.	CD	1 Bush	Dalam Kondisi Baik
39.	Camel	1	Dalam Kondisi Baik

40.	Mesin Kebut Makanan	1	
41.	Mesin Kebut Elektronik	1	
42.	Lemari Besi/ Meja	10	Dalam Kondisi Baik
43.	Lemari Kayu	74	Dalam Kondisi Baik
44.	Pek Besi	43	Dalam Kondisi Baik
45.	Fitting Cabinet Besi	20	Dalam Kondisi Baik
46.	Lemari Kayu	3	Dalam Kondisi Baik
47.	Aksi Pemotong Kertas	3	Dalam Kondisi Baik
48.	Mega Kangen Sport	143	Dalam Kondisi Baik
49.	Kursi Besi/ Metal	157	Dalam Kondisi Baik
50.	Kursi Kayu	105	Dalam Kondisi Baik
51.	Sarung	35	Dalam Kondisi Baik
52.	Bangku Masjid Besi/ Metal	4	Dalam Kondisi Baik
53.	Bangku Masjid Kayu	35	Dalam Kondisi Baik
54.	Mega Rapet	6	Dalam Kondisi Baik
55.	Mega Komputer	4	Dalam Kondisi Baik
56.	AC Besi	66	Dalam Kondisi Baik
57.	Basket	3	Dalam Kondisi Baik
58.	LCD Projector/ Laptop	1	Dalam Kondisi Baik
59.	Kunci-Sumur	5	Dalam Kondisi Baik
60.	Papan Visually/ Papan Nama	29	Dalam Kondisi Baik
61.	Trovoly	1	Dalam Kondisi Baik

62	Perkakas Koper Latengsi	4	Dalam Kondisi Baik
63	Maju Puspasari	2	Dalam Kondisi Baik
64	Ward Fiber Glas/ Plastik	72	Dalam Kondisi Baik
65	Gantungan Jemur	1	Dalam Kondisi Baik
66	Jam Elektronik	7	Dalam Kondisi Baik
67	Meja Dispensasi Deteksi	1	Dalam Kondisi Baik
68	Vacuum Cleaner	1	Dalam Kondisi Baik
69	Portable Air Conditioner Port (Airfog)	6	Dalam Kondisi Baik
70	Exhaust Fan	3	Dalam Kondisi Baik
71	Tang Ai / Tanchar Ai	1	Dalam Kondisi Baik
72	Teleskop	1	Dalam Kondisi Baik
73	Lampung Gantung Penyambut	5	Dalam Kondisi Baik
74	Cassette Player/ Walki	1	Dalam Kondisi Baik
75	Proyektor	1	Dalam Kondisi Baik
76	Tang Elektrik	9	Dalam Kondisi Baik
77	Dispenster	6	Dalam Kondisi Baik
78	Pulu Sibung	4	Dalam Kondisi Baik
79	Lembaran Instan	2	Dalam Kondisi Baik
80	Akreditasi	0	Dalam Kondisi Baik
81	Bingkai Foto	1	Dalam Kondisi Baik
82	Audio Mixing Portable	1	Dalam Kondisi Baik

42.	Aset Studio Layar	1	Dalam Kondisi Baik
43.	Telephon PHSQ	20	Dalam Kondisi Baik
44.	Charger	1	Dalam Kondisi Baik
45.	Kursi Radi	1	Dalam Kondisi Baik
46.	TV Monitor	1	Dalam Kondisi Baik
47.	Aset Perpaduan Nibuluan	6	Dalam Kondisi Baik
48.	Aset Press Kontra	1	Dalam Kondisi Baik
49.	Videotape	5	Dalam Kondisi Baik
50.	Komputer Layar	1	Dalam Kondisi Baik
51.	Pintu gerbang Lantai	1	Dalam Kondisi Baik
52.	Pintu	25	Dalam Kondisi Baik
53.	Scanner Pindai Otoscan	1	Dalam Kondisi Baik
	Komputer		

Statistik Kondisi Kendaraan Dinas pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahunan

2019 yaitu sebagai berikut

No.	Vehicles	Tahun perolehan	1st	2nd	3rd	4th
			Musim Dingin	Musim Panjang	Musim Panjang	Musim Panjang
Kendaraan 4-						
1.	New Mitsubishi Sedan	2010	✓			
2.	Toyota Vios	2006	✓			
3.	Toyota Kijang	2001	✓			
4.	Toyota Innova E	2006	✓			
5.	Toyota Innova G (Mitsubishi Diesel)	2011	✓			
6.	Roku 2					
7.	Honda Mio	2005	✓			
8.	Yamaha Jupiter MX	2005	✓			
9.	Yamaha Jupiter MX	2006	✓			
10.	Yamaha Jupiter Z	2016	✓			
11.	Yamaha Jupiter MX	AXV	✓			
12.	Honda GL Max	2002		✓		
13.	Honda GL Max	2003		✓		

Matrik Rumah Dinas pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2019

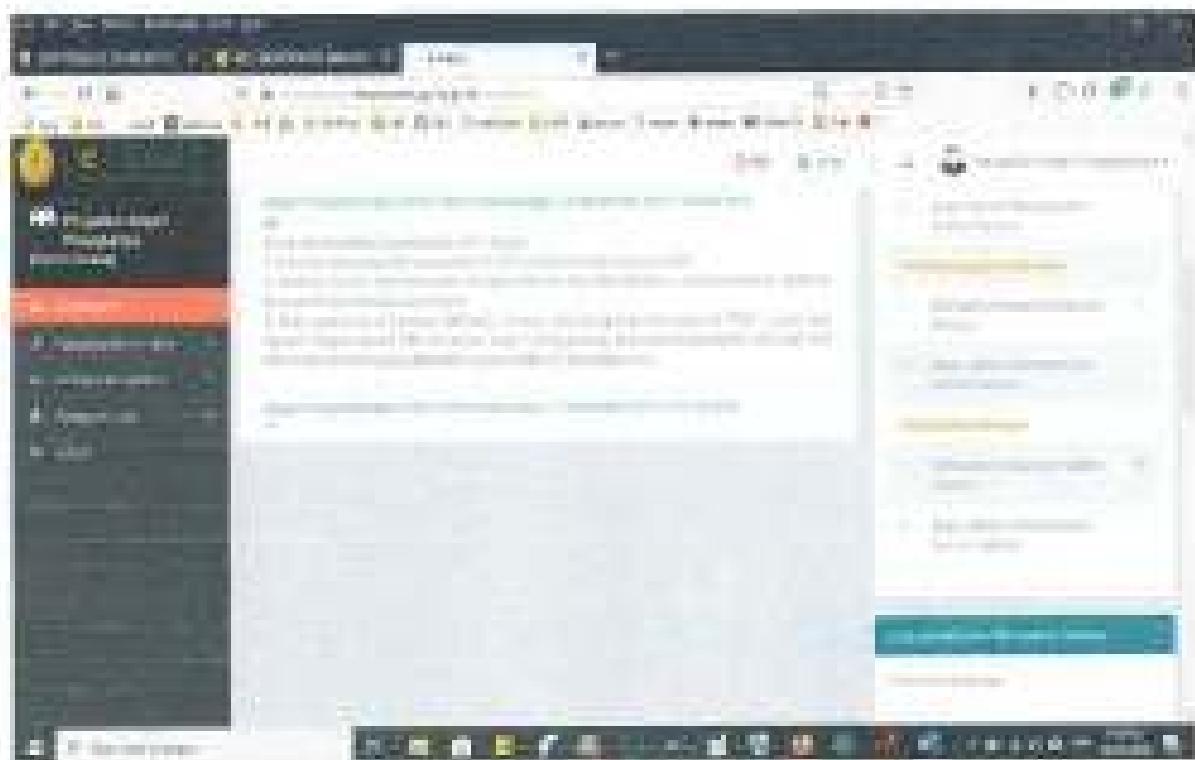
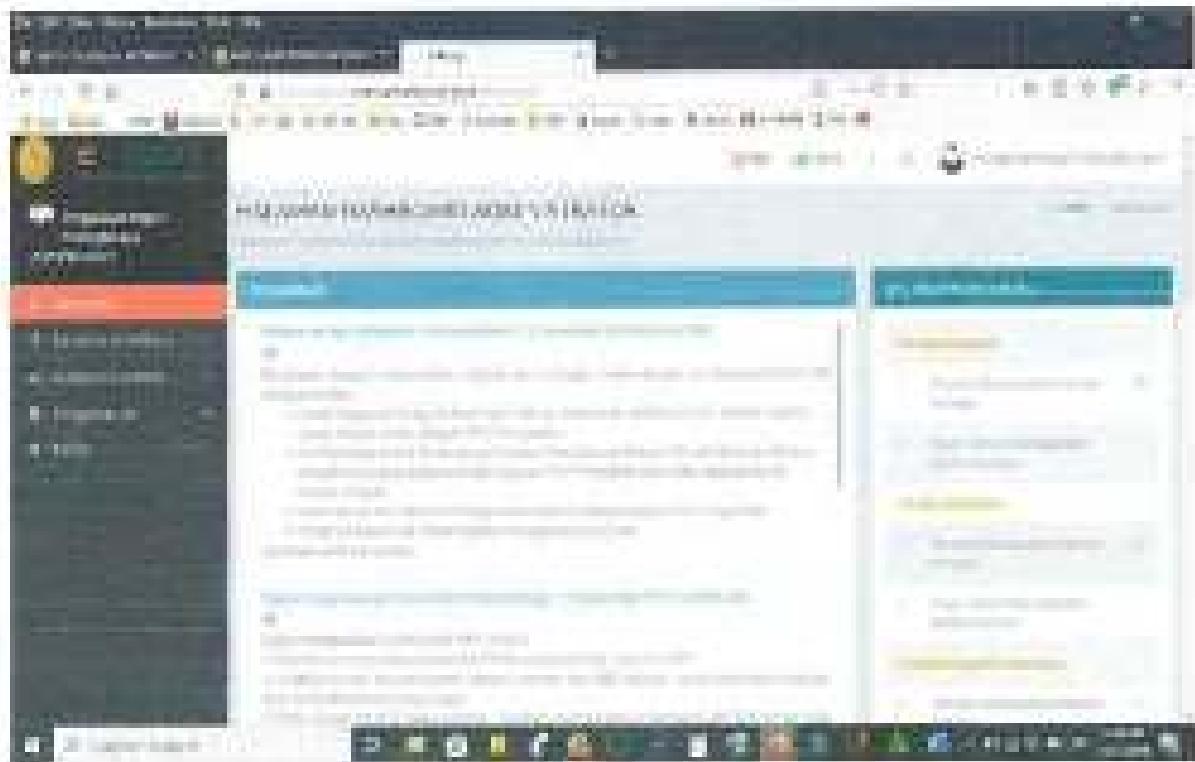
Writing assignments

No.	Lokasi	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Batu	Rusak ringan	Rusak berat	
1	Rumah Dinas	1	✓			
2	Rumah Dinas	1	✓			
3	Rumah Dinas	1	✓			
4	Rumah Dinas	1	✓			Rusak ringan = 5 Rusak berat = 1 (engsel dan kunci)
5	Rumah Dinas	1	✓			
6	Rumah Dinas	1	✓			

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi e-court pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah satu dari satuan kerja yang ditunjuk sebagai pengadilan percontohan untuk e-tiligasi yang merupakan kelembutan dari e-court. Sejak ditunjuk sebagai salah satu pengadilan percontohan hingga bulan Desember 2019, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menyelesaikan 141 perkara dengan menggunakan e-court. Perkara tersebut terdiri dari 97 perkara perdama gugatan, 2 perkara perdama bantahan, 7 perkara perdama gugatan sebaliknya dan 35 perkara perdama pemohonan.



Pada Tanggal 15 Oktober 2019 Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjokusumo berkesempatan mengunjungi Pengadilan Negeri Palangka Raya, dimana salah satu yang menjadi fokus perhatian beliau adalah implementasi pengadilan elektronik (e-court) pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.



2. Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara termasuk proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, hasil peradilan, tanggapan hakim yang bisa dilihat masyarakat kepuasan dan kemanfaatan dengan mutuah, cepat dan murah. Selain itu, aplikasi SIPP ini dilengkapi pimpinan pengadilan memonitor kinerja hakim dan operatur pengadilan, serta minimalkan sebagian media kerja yang efektif bagi intensitas pengadilan termasuk pengawasan media.

Pada akhir tahun 2019 Pengadilan Negeri Palangka Raya mendapatkan nilai implementasi evaluasi SIPP terbaik dengan kategori Pengadilan Negeri Kelas I A dengan jumlah perkara 501 sampai dengan 1000 dengan hasil nilai sebesar 917,99 point, sebagaimana surat Direktor Jenderal Bagan Peradilan UU Nomor 1155/D/BU/X/2018 tanggal 18 Desember 2018.

LAPORAN TAHUNAN 2019



Endangkem pada tahun 2019 Penugasan Negeri Palangka Raya untuk kategori Pengadilan Negeri kelas I A dengan jumlah perkara 100%; sampai dengan 20001 berada pada urutan No. 15 dengan jumlah nilai sebesar 637,39 point.



No	Nama	Tgl	Nilai
1			100,000
2			100,000
3			100,000
4			100,000
5			100,000
6			100,000
7			100,000
8			100,000
9			100,000
10			100,000
11			100,000
12			100,000
13			100,000
14			100,000
15	Endangkem	2019-01-01	637,390
16			100,000
17			100,000
18			100,000
19			100,000
20			100,000

| Home | Profil | Kew. | JU | Pengadaan | Bappeda | Palaangan | Raja | sejuk
ruang pemantauan SPP versi 3.3.0-L



STATISTIK PEMERINTAHAN PEMERINTAH

No	Kategori	Jumlah	Rincian	Tahun	
				2018	2019
1	Pengadaan	100	100	100	100
2	Ruang	100	100	100	100
3	Analisis	100	100	100	100
4	Bantuan	100	100	100	100
5	Kontak	100	100	100	100
6	FAQ	100	100	100	100
7	Materi	100	100	100	100
8	Laporan	100	100	100	100
9	Bantuan	100	100	100	100
10	Pengadaan	100	100	100	100
11	Analisis	100	100	100	100
12	Ruang	100	100	100	100
13	Kontak	100	100	100	100
14	FAQ	100	100	100	100
15	Materi	100	100	100	100
16	Laporan	100	100	100	100
17	Bantuan	100	100	100	100
18	Pengadaan	100	100	100	100
19	Analisis	100	100	100	100
20	Ruang	100	100	100	100
21	Kontak	100	100	100	100
22	FAQ	100	100	100	100
23	Materi	100	100	100	100
24	Laporan	100	100	100	100
25	Bantuan	100	100	100	100
26	Pengadaan	100	100	100	100
27	Analisis	100	100	100	100
28	Ruang	100	100	100	100
29	Kontak	100	100	100	100
30	FAQ	100	100	100	100
31	Materi	100	100	100	100
32	Laporan	100	100	100	100
33	Bantuan	100	100	100	100
34	Pengadaan	100	100	100	100
35	Analisis	100	100	100	100
36	Ruang	100	100	100	100
37	Kontak	100	100	100	100
38	FAQ	100	100	100	100
39	Materi	100	100	100	100
40	Laporan	100	100	100	100
41	Bantuan	100	100	100	100
42	Pengadaan	100	100	100	100
43	Analisis	100	100	100	100
44	Ruang	100	100	100	100
45	Kontak	100	100	100	100
46	FAQ	100	100	100	100
47	Materi	100	100	100	100
48	Laporan	100	100	100	100
49	Bantuan	100	100	100	100
50	Pengadaan	100	100	100	100
51	Analisis	100	100	100	100
52	Ruang	100	100	100	100
53	Kontak	100	100	100	100
54	FAQ	100	100	100	100
55	Materi	100	100	100	100
56	Laporan	100	100	100	100
57	Bantuan	100	100	100	100
58	Pengadaan	100	100	100	100
59	Analisis	100	100	100	100
60	Ruang	100	100	100	100
61	Kontak	100	100	100	100
62	FAQ	100	100	100	100
63	Materi	100	100	100	100
64	Laporan	100	100	100	100
65	Bantuan	100	100	100	100
66	Pengadaan	100	100	100	100
67	Analisis	100	100	100	100
68	Ruang	100	100	100	100
69	Kontak	100	100	100	100
70	FAQ	100	100	100	100
71	Materi	100	100	100	100
72	Laporan	100	100	100	100
73	Bantuan	100	100	100	100
74	Pengadaan	100	100	100	100
75	Analisis	100	100	100	100
76	Ruang	100	100	100	100
77	Kontak	100	100	100	100
78	FAQ	100	100	100	100
79	Materi	100	100	100	100
80	Laporan	100	100	100	100
81	Bantuan	100	100	100	100
82	Pengadaan	100	100	100	100
83	Analisis	100	100	100	100
84	Ruang	100	100	100	100
85	Kontak	100	100	100	100
86	FAQ	100	100	100	100
87	Materi	100	100	100	100
88	Laporan	100	100	100	100
89	Bantuan	100	100	100	100
90	Pengadaan	100	100	100	100
91	Analisis	100	100	100	100
92	Ruang	100	100	100	100
93	Kontak	100	100	100	100
94	FAQ	100	100	100	100
95	Materi	100	100	100	100
96	Laporan	100	100	100	100
97	Bantuan	100	100	100	100
98	Pengadaan	100	100	100	100
99	Analisis	100	100	100	100
100	Ruang	100	100	100	100
101	Kontak	100	100	100	100
102	FAQ	100	100	100	100
103	Materi	100	100	100	100
104	Laporan	100	100	100	100
105	Bantuan	100	100	100	100
106	Pengadaan	100	100	100	100
107	Analisis	100	100	100	100
108	Ruang	100	100	100	100
109	Kontak	100	100	100	100
110	FAQ	100	100	100	100
111	Materi	100	100	100	100
112	Laporan	100	100	100	100
113	Bantuan	100	100	100	100
114	Pengadaan	100	100	100	100
115	Analisis	100	100	100	100
116	Ruang	100	100	100	100
117	Kontak	100	100	100	100
118	FAQ	100	100	100	100
119	Materi	100	100	100	100
120	Laporan	100	100	100	100
121	Bantuan	100	100	100	100
122	Pengadaan	100	100	100	100
123	Analisis	100	100	100	100
124	Ruang	100	100	100	100
125	Kontak	100	100	100	100
126	FAQ	100	100	100	100
127	Materi	100	100	100	100
128	Laporan	100	100	100	100
129	Bantuan	100	100	100	100
130	Pengadaan	100	100	100	100
131	Analisis	100	100	100	100
132	Ruang	100	100	100	100
133	Kontak	100	100	100	100
134	FAQ	100	100	100	100
135	Materi	100	100	100	100
136	Laporan	100	100	100	100
137	Bantuan	100	100	100	100
138	Pengadaan	100	100	100	100
139	Analisis	100	100	100	100
140	Ruang	100	100	100	100
141	Kontak	100	100	100	100
142	FAQ	100	100	100	100
143	Materi	100	100	100	100
144	Laporan	100	100	100	100
145	Bantuan	100	100	100	100
146	Pengadaan	100	100	100	100
147	Analisis	100	100	100	100
148	Ruang	100	100	100	100
149	Kontak	100	100	100	100
150	FAQ	100	100	100	100
151	Materi	100	100	100	100
152	Laporan	100	100	100	100
153	Bantuan	100	100	100	100
154	Pengadaan	100	100	100	100
155	Analisis	100	100	100	100
156	Ruang	100	100	100	100
157	Kontak	100	100	100	100
158	FAQ	100	100	100	100
159	Materi	100	100	100	100
160	Laporan	100	100	100	100
161	Bantuan	100	100	100	100
162	Pengadaan	100	100	100	100
163	Analisis	100	100	100	100
164	Ruang	100	100	100	100
165	Kontak	100	100	100	100
166	FAQ	100	100	100	100
167	Materi	100	100	100	100
168	Laporan	100	100	100	100
169	Bantuan	100	100	100	100
170	Pengadaan	100	100	100	100
171	Analisis	100	100	100	100
172	Ruang	100	100	100	100
173	Kontak	100	100	100	100
174	FAQ	100	100	100	100
175	Materi	100	100	100	100
176	Laporan	100	100	100	100
177	Bantuan	100	100	100	100
178	Pengadaan	100	100	100	100
179	Analisis	100	100	100	100
180	Ruang	100	100	100	100
181	Kontak	100	100	100	100
182	FAQ	100	100	100	100
183	Materi	100	100	100	100
184	Laporan	100	100	100	100
185	Bantuan	100	100	100	100
186	Pengadaan	100	100	100	100
187	Analisis	100	100	100	100
188	Ruang	100	100	100	100
189	Kontak	100	100	100	100
190	FAQ	100	100	100	100
191	Materi	100	100	100	100
192	Laporan	100	100	100	100
193	Bantuan	100	100	100	100
194	Pengadaan	100	100	100	100
195	Analisis	100	100	100	100
196	Ruang	100	100	100	100
197	Kontak	100	100	100	100
198	FAQ	100	100	100	100
199	Materi	100	100	100	100
200	Laporan	100	100	100	100
201	Bantuan	100	100	100	100
202	Pengadaan	100	100	100	100
203	Analisis	100	100	100	100
204	Ruang	100	100	100	100
205	Kontak	100	10		

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan Negeri Palangka Raya telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Dirjen Badilum dengan nilai A excellent. Penilaian nilai A Excellent kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah merupakan prestasi yang membanggakan bagi seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Palangka Raya yang tentunya raihan ini tidak datang begitu saja melainkan melalui sebuah proses keperencanaan, kedisiplinan, kerjasama, serta komitmen untuk melaksanakan perbaikan mendasar melalui reformasi hukum dan sebagaimana pelayanan publik semakin baik.

Pengiriman Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada 4 lingkungan peradilan Mahkamah Agung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali S.H., M.H. di lakukan pada Jumat, 13 Juli 2018 sekaligus Acara peluncuran aplikasi e-court www.Pembinaan Teknis Yudisial.

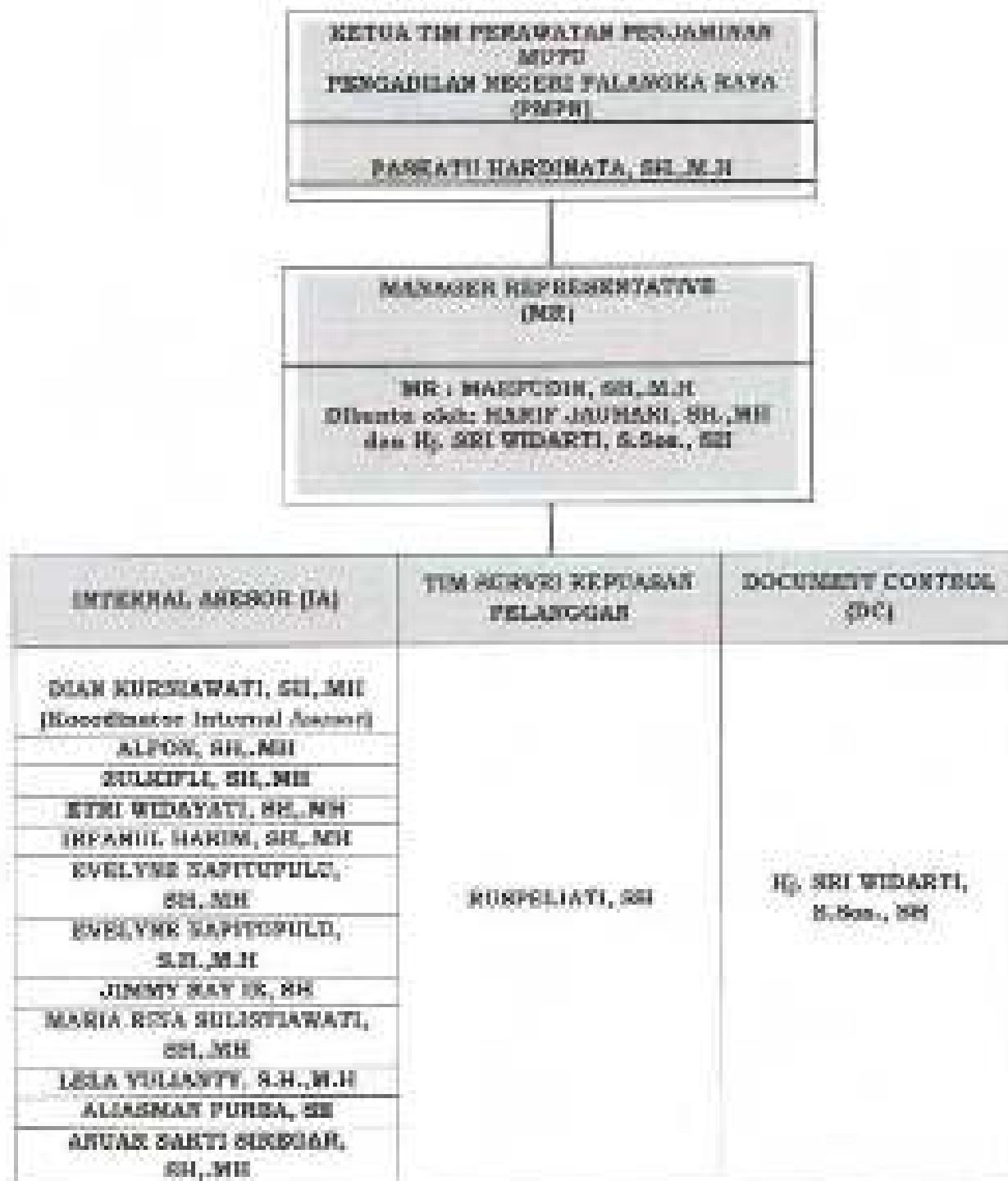


*Alispuh Surat Keputusan Berita Pengadilan Negeri/Tipikor/Hilang
Industri Palangka Raya Kelas I A Nomor :
0110/KPN/DT.03.3/8K/10/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang
Perubahan Penunjukan Pengusulan Tim Penyelesaian Akreditasi
Irigjamman Muta Pengadilan Negeri/Tipikor/Hilang Industri
Palangka Raya Kelas I A yaitu dengan susunan sebagai berikut:*

LAPORAN TAHUNAN 2019

NO.	NAME SURNAME	POSITION	FUNCTION
1.	PAK AYU HARYNATA, S.I.,M.I.	Ketua Pengabdian Negeri	Kewali Dikti Pengabdian Negeri (PPN)
2.	MARPUHN, S.I.,M.I	Wakil Ketua Pengabdian Negeri	Manager Representative (MR)
3.	HASYI JAUHAGI, S.H.,M.H.	Praheran	Stembatu Manager Representative
4.	Hj. ER. WIDARTI, S.Sos., S.E	Sekretaris	Stembatu Manager Representative
5.	DIAN KURNIAWATI, S.H.,M.H	Hukum	Koordinator Asesor Internasional
6.	ALPOX, S.H.,M.I	Hukum	Internal Assessor (IA)
7.	ZUCKRIE, S.H.,M.I	Hukum	Internal Assessor (IA)
8.	RTHI WISAYANTI, S.H.,M.H	Hukum	Internal Assessor (IA)
9.	IRFAUL HAKIM, S.H.,M.H	Hukum	Internal Assessor (IA)
10.	JIMMY RAY DS, S.H	Hukum	Internal Assessor (IA)
11.	EVELINE SAPITUPUJI, S.H.,M.H	Hukum	Internal Assessor (IA)
12.	MARIA RINA SUJESTIWIADI,S.I.,M.H	Hukum	Internal Assessor (IA)
13.	LELA YANTIANTY, S.H.,M.H	Hukum Adress PMII	Internal Assessor (IA)
14.	ALFARMAN PUTRA, S.K	Hukum Adress PMII	Internal Assessor (IA)
15.	ASUAR RAETH SIREGAR, S.H.,M.H	Hukum Adress Tigilar	Internal Assessor (IA)
16.	IRUSPELIATI, S.H	Paritisan Muha Hukum	Tujuan Survei Kegiatan Pelangganan
17.	Hj. SRI WIDARTI, S.Sos., M.P	Sekretaris	Document Of Control (DOC)

STRUKTUR ORGANISASI TIM (PPTM) PERAWATAN PEMERINTAHAN SUTU
PERGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA KELAS I A



B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor: 77/DJU/SK/HM023/2/2018 Tanggal 26 Februari 2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang seharusnya dianggap PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan meski itu pilot.
2. Penyelenggara PTSP adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
3. Pilot Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Pemberi dan Sistematisasi dengan tujuan dan fungsi masing-masing.
4. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan yang disesuaikan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri bagi masyarakat penuntut keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pidana yang dimaksud dalam keputusan ini adalah pidana umum dan pidana khusus.

6. Perilaku yang dimaksud dalam keputusan ini adalah perdamaian umum dan perdamaian khusus.

PTSP bertujuan untuk:

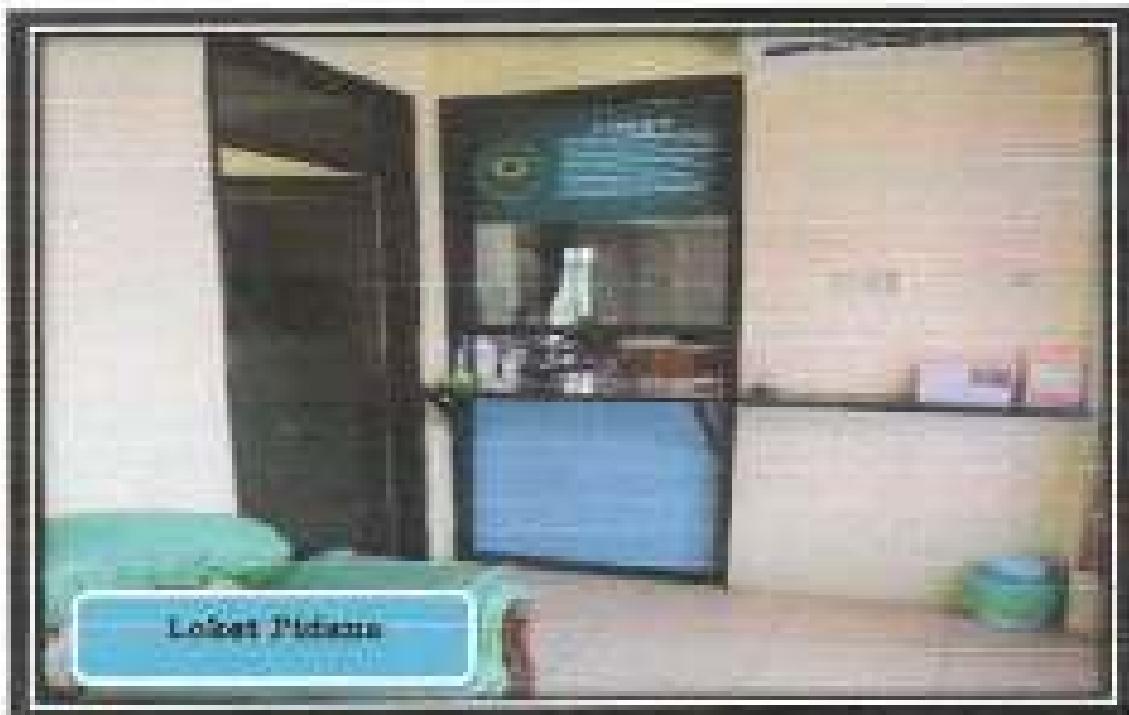
- Mewujudkan jasanya pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terulir sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
- Memberikan pelayanan yang prima, akurasi tinggi, dan anti korupsi, kolusi, nafsu bawaan,

Pelayanan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebelum adanya

PTSP









Perekoran PTSP Pengadilan Negeri Palangka Raya pada Bulan September 2018

Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 telah dilaksanakan penerapan Pelajaran Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri 3c Kalimantan Tengah secara langsung oleh Direktur Jenderal Hukum Peradilan Umum, Bapak Dr. H. HERIK SWANTOYO, S.H., M.H., secara di pusatkan di Pengadilan Negeri Tipikor/Hubungan Industri Palangka Raya Kelas IA yang beralamat di jalan Panglima Diponegoro Nomor 21 Palangka Raya.



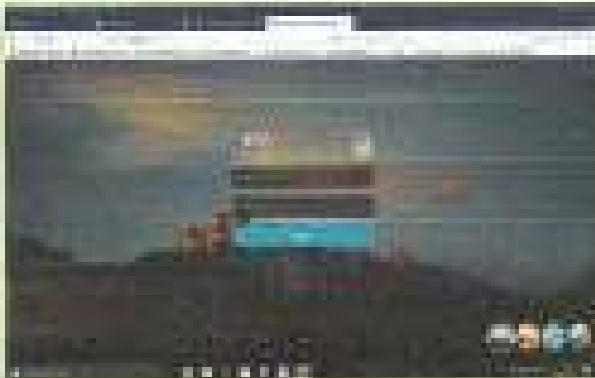


Penampilan Baris PTSP pada Punggahan Negeri Palangka Raya



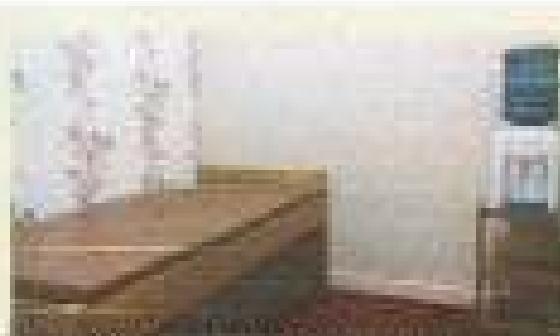
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan Publik yang ada di Pengadilan Negeri Palangka Raya yaitu sebagai berikut:

No.	Kategori/Manfaat Pelayanan Publik	Gambar
1	PTSP Melakukan Tripartite Between Pejabat yang melibatkan anggota PPPK untuk penyelesaian perselisihan dalam proses dilaksanakan dan tetap sendiri sejak dengan teknologi peserta didik, untuk pelajaran pengabdian teknologi informasi.	
2	ITSP-Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> - Informasi/Indeks - penerapan peraturan yang cepat, mudah, transparan, terbuka kepada dengan standar yang telah ditetapkan. - Standardisasi pelayanan yang prima, efektif dan efisien. 	

<p>PTSP: dikembangkan dengan pertama kali dikembangkan di Provinsi Kalimantan Selatan dan di Provinsi Kalimantan Barat.</p>	
<p>SOP: a. PTSP: mengelola teknologi teknologi berbasis hasil analisis memberikan saran dan panduan teknis keberadaan makrofauna tersebut.</p>	
<p>Metode Pengambilan Makanan Dalam Dusun: Metode pengambilan makanan dalam dusun yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan tertentu (properti tanah atau tanaman dan lingkungan) seperti: Makanan yang tumbuh dapat ditemui di sekitar rumah.</p>	 

Ruang Ria Mengandung



Ruang Tinggi Ria Mengandung

Ruang Tinggi Pengembangan
Seluring



Ruang Tinggi Ria Mengandung Seluring

Ruang Selang Atas



Ruang Tinggi Atas



III	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	
III	Penyediaan dan Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur	
III	Desentralisasi dan Keterwakilan untuk Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur	
III	Tenaga Charger Muda untuk Pengembangan Sumberdaya	

	<p>Bantuan</p> <p>Bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidangan spesial pada hari kematian.</p>	
	<p>Aplikasi Shopee Martan</p> <p>Aplikasi yang digunakan untuk membeli barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan harga terjangkau.</p>	

	Parking Area	Depo Minyak	Area	
	Pos Satpam Grahaga Utama			
	Perhimpunan Budidaya tanaman rambutan, longan dan	Budidaya		

	<p>Ruang kerja terbuka</p> 
	<p>Basis antara JPSI</p> 
	<p>Ringan</p> <p>Kursus pelajaran - mode elektronik dalam meningkatkan produktiviti penyelesaian Nivel Keterwujudan pada Pengeluaran Projek</p> 

A. Kinerja	B. Kinerja
<p>Kinerja</p> <p>Bantuan hukum dan Penggana Terhadap masyarakat. Berbasis Sistem Online. Mengintegrasikan Juknis Pengadaan Bantuan Hukum online, dan Pengaduan masyarakat. Penanggulangan yang dilakukan dengan sistem elektronik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pengawasannya <p>Bantuan hukum dan penggana online</p>	 <p>e-Court Mahkamah Agung RI</p> <p>www.ecourt.go.id</p> <p>Search</p>
<p>Kinerja</p> <p>Bantuan hukum dan Penggana Terhadap masyarakat. Berbasis Sistem Online. Mengintegrasikan Juknis Pengadaan Bantuan Hukum online, dan Pengaduan masyarakat. Penanggulangan yang dilakukan dengan sistem elektronik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pengawasannya <p>Bantuan hukum dan penggana online</p>	 <p>e-Court Mahkamah Agung RI</p> <p>www.ecourt.go.id</p> <p>Search</p>



BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Adapun makna, tujuan dan fungsi pengawasan berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung XI Nomor : KMA/OBQ/SK/VIII/2006 adalah sebagai berikut:

1. Maksud Pengawasan

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk menegah terjadinya penyimpangan, misi administrasi, dan tidak efektivitas penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagaimana dalam bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku agen pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan tujuan dan kewajiban perundang undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dielaklu secara terilengkap, efektif, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan selaku halnya.
- c. Mengamati terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para petugas keadilan yang meliputi kualitas pertusaa, waktu penyelesaian perkara yang besar, dan biaya berperluar yang amanah.

Pada dasarnya pengawasan internal dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni:

a. Pengawasan Melalui

Pengawasan Melalui adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh staf ahli

fungsi dan tindak bawahan secara preventif dan repressif agar pelaksanaan tugas kewajibannya tersebut berjalan sesuai efektif dan efisien serta dengan rincian legislasi dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pengawasan melalui telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A Nomor : 0109/KPN/OT.01.2/8K/10/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Koordinator Pengawas dan Wakil Pengawas Didengar pada Pengadilan Negeri/Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A yang sebagai berikut:

LAPORAN TAHUNAN 2015

NO.	NAMA JUDIK	KETERBUKAAN
1.	MARHUDIK, SH.,MH	Koordinator Pengadilan
2.	JENNY RAY JE, SH	Hakim Pengawas Bidang Pidana
3.	ZUKEFLI, SH.,MH	Hakim Pengawas Bidang Perdata
4.	ESTRI HIDAYAH, SH.,MH	Hakim Pengawas Bidang Tulurw.
5.	UKLA TULIANTY, SH.,MH	Hakim Pengawas Bidang PTI
6.	RADJA, SH.,MH	Hakim Pengawas Bidang Tipikor
7.	DIAW KURNIAWATI, SH.,MH	Hakim Pengawas Bidang Urusan dan Kewangan dan Pengawas Bedung PTI
8.	EVELYNIE NARYUPULU, SH.,MH	Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
9.	ALPOW, SH.,MH	Hakim Pengawas Bidang Keprofesian, Organisasi Dan Tuhn Leksono
10.	IRFANUL HAKIM, SH.,MH	Hakim Pengawas Bidang E- Court
11.	MARIA ZIVA S., SH.,MH	Hakim Pengawas Bidang Penelitian Ekstensi
12.	ESTRI HIDAYAH, SH.,MH	Hakim Pengawas dan Pengawas Pidana Pidana yang adalah HTI

Hukum-hukum Pengawas Bidaung tersebut secara perorotik sejauh 1 (satu) halaman selanjutnya menyampaikan keputusan hasil pengawasan bidaung masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Berdangkan pengawasan melalui yang memperlukan tugas dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dilaksanakan biasanya 2 (dua) kali dalam seinhun.

b. Pengawasan Pungkiman

Pengawasan Pungkiman adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang pegawai yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam setiap kerja sehari-hari yang dipentulidkan untuk itu, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dewan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. EVALUASI

Evaluasi merupakan suatu proses memeriksa sesuatu yang diklasifikasikan pada kriteria atau tujuan yang telah di tetapkan, yang akhirnya dikenai dengan penambagan keputusan atas objek yang dinilai.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya secara rutin melakukan evaluasi kinerja terhadap aparaturnya melalui briefings atau rapat kordinasi yang selalu dilaksanakan setiap bulannya. Rapat

Isi laporan selain untuk evaluasi kinerja, juga dititikberatkan sebagai wadah untuk memfasilitasi arus informasi dalam pelaksanaan tugas serta juga bertujuan untuk membangun keterkaitan antar keluaran besar Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Dari Evaluasi Pengarahan tersebut masingnya dapat dirumuskan solusi dan kesiapan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada. Seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan tepat waktu, tertib dan lancar sesuai dengan hasil yang diharapkan.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah diusulkan guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat purwoposri kesadaran.
2. Sangat disadari bahwa peningkatan kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tujuan sebagai pejabat masyarakat pencari keadilan, namun sebaliknya upaya ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang akan dibangun oleh seorang jaksa di Pengadilan Negeri Palangka Raya.
3. Menggunakan Kebijakan Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas idenja Pengadilan Negeri Palangka Raya dari masa ke masa sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja.
4. Rap. Pengadilan Negeri Palangka Raya, Laporan Tahunan 2019 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan peningkatan dalam penyusunan dan implementasi pada masa-masa mendatang.

B. REKOMENDASI

1. Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan baik Teknis maupun Sosial Teknis agar dicapai menjalankan tugas dan fungsiya dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterangaman Sumber Daya Manusia untuk peningkatan peningkatan target pelayanan publik yang prima dan berbasis IT (Informasi Teknologi).
3. Perlu adanya penambahan personil pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, baik di Ibu Kantor, Pemberi Pengawas, Juruata, maupun staf mengingat Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini masih terbatas.